

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis online scam saat ini menjadi isu nasional yang menarik perhatian luas, baik dari masyarakat maupun Pemerintah Indonesia. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah bersinergi melalui Gugus Tugas TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menekan angka korban TPPO, khususnya melalui tiga instansi utama, yaitu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu dibenahi, seperti koordinasi antarlembaga yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini, serta meningkatnya variasi modus TPPO lintas negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus TPPO.

Sebagai organisasi internasional di bidang migrasi, IOM berperan sebagai aktor independen yang turut memengaruhi arah kebijakan dan memperkuat strategi nasional dalam menangani perdagangan orang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, IOM menggunakan pendekatan 3P (Prevention, Protection, dan Prosecution) sebagai dasar dalam merancang program pencegahan dan penanganan TPPO berbasis online scam. Namun, pelaksanaan upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti keterbatasan data pekerja migran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO, serta tantangan koordinasi dalam Gugus Tugas. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa IOM dan Pemerintah Indonesia telah berupaya dan bersinergi dalam menangani perdagangan orang berbasis online scam sepanjang tahun 2021–2023. Meskipun masih terdapat berbagai kendala,

sinergi antara kedua pihak ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menekan angka korban TPPO di Indonesia.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah Penulis jabarkan, terkait dengan “Upaya IOM dan Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Perdagangan Manusia Di Indonesia melalui *Online Scam* 2021 – 2023” maka terdapat beberapa saran dari peneliti diantaranya:

1. IOM dapat memperluas strategi komunikasi publik dan kampanye digital yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang berbasis *online scam*. IOM dapat membentuk program *digital awareness* melalui kolaborasi dengan *influencer*, lembaga pendidikan, serta media massa agar pesan pencegahan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif.
2. IOM perlu memperkuat koordinasi dan transfer pengetahuan kepada instansi pemerintah Indonesia, khususnya melalui pelatihan lintas lembaga dan pengembangan kapasitas (*capacity building*). Dengan demikian, pemerintah dapat menerapkan standar dan praktik terbaik yang digunakan IOM dalam penanganan kasus TPPO lintas negara.
3. IOM dapat membentuk posisi Duta IOM (IOM Ambassador) yang bertugas menyebarluaskan konten dan edukasi publik mengenai pencegahan perdagangan manusia. Program ini dapat dikembangkan melalui kompetisi antarnegara atau kolaborasi dengan komunitas lokal agar pesan pencegahan lebih inklusif dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia.